

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

DKI Jakarta merupakan wilayah ibukota negara Indonesia yang secara geografis terletak pada posisi 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Bujur Timur. Menurut Keputusan Gubernur No 1227 Tahun 1989, luas wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah 7.659,02 km², terdiri dari daratan seluas 661,52 km², termasuk 110 pulau di Kepulauan Seribu, dan lautan seluas 6.997,50 km². Secara historis Jakarta memang sudah mengenal rentetan banjir besar bahkan sejak zaman penjajahan Belanda di tahun 1600-an, dimana pada masa itu dilakukan pembangunan sejumlah kanal dan sodetan Kali Ciliwung untuk mengatasi banjir yang terjadi. Pada tahun 1918 banjir besar kembali menerjang ibukota dan tepat dua tahun setelah nya pada tahun 1920 Gubernur Jendral VOC Johan Paul van Limburg Stirum mencanangkan untuk pembangunan Kanal Banjir Barat. Setelah masa penjajahan berakhir di tahun 1965 banjir kembali menjadi perhatian khusus Pemprov DKI Jakarta, dimana pemerintah saat itu membentuk Komando Proyek Pencegahan Banjir yang pada tahun 1972 berganti nama menjadi Proyek Pengendalian Banjir Jakarta Raya. Ali Sadikin yang saat itu selaku sebagai Gubernur DKI Jakarta menggandeng Netherlands Engineering Consultants untuk membangun waduk dalam kota serta pembuatan saluran baru di wilayah Cengkareng dan Cakung.

Upaya perpanjangan saluran kolektor, normalisasi sungai sampai sodetan kali sudah dilakukan, akan tetapi banjir besar tetap terjadi di ibukota pada awal

1976. Beberapa tahun berselang pada masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso, Jakarta kembali dilanda banjir besar di tahun 2002 dan 2007. Banjir pada tahun 2007 menjadi banjir yang cukup luas merendam wilayah Jakarta serta banyak memakan korban jiwa. Setidaknya terdapat 320.000 ribu jiwa warga yang harus mengungsi dan memakan 80 korban jiwa. Banjir ini disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi dan mengakibatkan tanggul di Banjir Kanal Barat (BKB) aliran Kali Sunter jebol yang merendam kawasan Jatibaru – Tanah Abang dan Petamburan setinggi dua meter. Selang beberapa tahun tepatnya pada Februari 2015 tercatat sedikitnya 52 titik banjir tersebar di wilayah Jakarta. Ketinggian banjir yang melanda mulai dari 40 cm hingga 80 cm sehingga menghambat akses mobilitasi warga. Adapun dampak dari banjir ini yaitu beberapa perjalanan KA Commuter Jabodetabek terhambat dan sebanyak 469 gardu listrik di beberapa wilayah Jakarta hingga Kota Tangerang di padamkan oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara materil kerugian akibat banjir yang terjadi sebesar Rp 1,5 Triliun. Banjir tahun 2015 menjadi banjir terbesar yang terjadi selama kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sejak resmi memimpin DKI menggantikan Joko Widodo pada 16 Oktober 2014.

Sejak banjir itu penanggulangan banjir mulai gencar dilakukan oleh Pemprov DKI salah satu nya ialah normalisasi Sungai Ciliwung selain itu pada kepemimpinan Joko Widodo bersama dengan kepala daerah Se-Jawa Barat di tahun 2014 disepakati dalam rapat di Bandung Katulampa terkait pembangunan bendungan yaitu Bendungan Sukamahi dan Ciawi. Rencananya bendungan ini mulai akan dibangun di tahun 2019 dan ditargetkan selesai 2020. Bendungan ini diharapkan mampu untuk menampung aliran Sungai Cisarua, Sungai Cibogo dan

anak Sungai Ciliwung dengan volume tampungan mencapai 6,45 Juta m³. Belum lagi bendungan yang direncanakan selesai Jakarta kembali dilanda banjir besar, curah hujan yang cukup tinggi serta intensitasnya yang lama menyebabkan beberapa wilayah di Jakarta terendam, ini merupakan banjir besar yang kembali melanda Jakarta setelah berselang 4 tahun dari banjir besar sebelumnya dan secara historis curah hujan yang mengguyur Jakarta merupakan yang tertinggi sejak 1996 menurut BMKG. Akibat dari banjir ini menurut Humas BNPB terdapat 169 titik yang tersebar diseluruh wilayah Jabodetabek dan Banten dan secara materil mengalami kerugian hingga Rp 960 miliar.

Merujuk pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur DKI Jakarta Tahun 2018, Jakarta berpeluang untuk mengalami siklus banjir besar setiap 5 hingga 6 tahun sekali. Melihat rekam jejak yang terjadi di wilayah Jakarta, permasalahan ini sudah merupakan pekerjaan rumah yang harus terus segera di tuntaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Permasalahan banjir yang melanda wilayah Jakarta cukup menjadi permasalahan serius dan memiliki dampak terhadap terganggunya perekonomian negara Indonesia, dimana Jakarta yang merupakan ibukota negara Indonesia sehingga baik pusat pemerintahan maupun pusat perekonomian terjadi di Jakarta, apabila Jakarta terhambat mobilitasnya akibat dari banjir yang melanda maka ini dapat memberikan dampak secara nasional.

Dalam penanggulangannya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah melakukan upaya diantaranya dengan implementasi kebijakan serta membuat program yang bersifat jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Akan tetapi tentu dalam pengimplementasian kebijakan yang dilakukan terdapat faktor-

faktor yang dapat mendukung maupun menghambat keberjalanan program. Selama dua periode kepemimpinan terakhir Gubernur DKI Jakarta pada penanggulangan banjir terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari segi program maupun anggaran yang digelontorkan untuk menanggulangi permasalahan tahunan yang selalu melanda DKI Jakarta. Perbedaan dari segi program ataupun kebijakan yang dilakukan untuk menanggulangi banjir tentu memiliki dampak yang berbeda pula.

Kebijakan-kebijakan dalam penanggulangan banjir dibagi dalam tiga kurun waktu antara lain jangka pendek, menengah dan panjang. Berbagai kebijakan serta program penanggulangan banjir dicanangkan secara serius oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi perbedaan kebijakan, program maupun anggaran pada dua periode terakhir kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan cukup menjadi sorotan, secara general berdasarkan data yang ada dari segi anggaran pada tahun 2016 Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan Rp 2,5 Triliun untuk penanggulangan banjir sedangkan di tahun 2020 Pemprov DKI Jakarta tercatat hanya mengalokasikan Rp 96,7 Miliar, perbedaan tidak hanya dari segi anggaran akan tetapi dari segi program berikut perbedaan program penanggulangan banjir DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Basuki Tjahja Purnama dan Anies Baswedan :

Tabel 1.1
Perbedaan Penanggulangan Banjir DKI Jakarta

NO	BASUKI	ANIES
1	Normalisasi Sungai	Naturalisasi Sungai
2	Pengendalian Banjir Lewat Pembuatan Situ, Waduk, Embung, dan Kanal	Membangun Kolam Retensi
3	Optimalisasi dan Perbaikan Pompa	Membangun Tanggul di Pesisir Jakarta
4	Pembuatan Sumur Resapan Hingga Biopori	Membuat Sumur Resapan Air atau Drainase Vertikal

Sumber : www.kompas.tv

Apabila dilihat secara sekilas perbedaan yang terjadi dari sisi program yang dicanangkan terdapat sedikit kemiripan, akan tetapi tetap saja terjadi cukup banyak perbedaan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta terkait penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penanggulangan banjir yang dilakukan tidak langsung bisa mencegah datang nya banjir apabila musim penghujan tiba dan tinggi nya intensitas curah hujan, tetap saja apabila curah hujan yang mengguyur wilayah Jakarta intensitas nya cukup tinggi, banjir masih tidak dapat terhindarkan. Berikut data banjir yang terjadi pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan :

Tabel 1.2

**Data Wilayah dan Warga Terdampak Banjir Wilayah DKI Jakarta Periode
Basuki Tjahaja Purnama (2015-2017) dan Anies Baswedan (2018-2020)**

NO	BULAN	KECAMATAN TERDAMPAK	KELURAHAN TERDAMPAK	WARGA TERDAMPAK	KORBAN MENINGGAL
1	Januari 2015	15	36	13.073	0
2	Februari 2015	38	133	231.556	5
3	Januari 2016	8	13	3.853	0
4	Februari 2016	25	70	70.218	0
5	Januari 2017	4	5	Tak ada data	0
6	Februari 2017	31	67	19.325	6
7	Januari 2018	5	8	0	0
8	Februari 2018	24	43	19.456	1
9	April-Mei- Oktober 2019	15	29	3.860	2
10	Januari 2020	17	39	Belum ada data	9

Sumber : Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Tabel 1.3

**Data Jumlah Pengungsi dan Kondisi Banjir Wilayah DKI Jakarta Periode
Basuki Tjahaja Purnama (2015-2017) dan Anies Baswedan (2018-2020)**

NO	BULAN	JUMLAH PENGUNSI	JUMLAH PENGUNSIAN	LAMA GENANGAN	KETINGGIAN BANJIR
1	Januari 2015	3.255	59	2 Hari	10-150 cm
2	Februari 2015	41.202	337	7 Hari	10-200 cm
3	Januari 2016	Tak ada data	Tak ada data	2 Hari	10-80 cm
4	Februari 2016	1.137	45	2 Hari	5-200 cm
5	Januari 2017	Tak ada data	Tak ada data	2 Hari	10-70 cm
6	Februari 2017	5.858	45	5 Hari	10-250 cm
7	Januari 2018	0	0	1-2 Hari	5-40 cm
8	Februari 2018	15.558	60	1-6 Hari	5-300 cm
9	April-Mei- Oktober 2019	725	13	Tidak ada data	Tidak ada data
10	Januari 2020	11.474	70	Tidak ada data	Tidak ada data

Sumber : Badan Nasioal Penanggulangan Bencana (BNPB)

Dampak yang terjadi akibat banjir yang terjadi tentulah tidak terlepas dari program maupun kebijakan yang dicanangkan bahkan hingga kerugian yang ditimbulkan dari banjir ini pun juga tidak terlepas dari penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui secara lebih lanjut dan komprehensif upaya dalam penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta pada dua periode terakhir kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan sebab permasalahan banjir ini sudah menjadi pekerjaan rumah yang cukup serius untuk segera ditangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu peneliti memulai penelitian ini dengan judul **STUDI KOMPARASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR WILAYAH DKI JAKARTA PADA ERA KEPEMIMPINAN BASUKI TJAHAJA PURNAMA DAN ANIES BASWEDAN.**

1.2 Rumusan Masalah

Melihat penjelasan pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang terjadi adalah seperti apa perbedaan dalam penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta pada dua era periode kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta sehingga dapat memberikan dampak yang berbeda bagi masyarakat dalam setiap pengimplimentasian kebijakannya. Rumusan masalah yang menjadi bahan penelitian adalah :

1. Bagaimana Kebijakan Basuki Tjahaja Purnama Dalam Penanggulangan Banjir?
2. Bagaimana Kebijakan Anies Baswedan Dalam Penanggungan Banjir?
3. Bagaimana Perbedaan dan Persamaan Kebijakan Penanggulangan Banjir di DKI Jakarta Pada Era Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui serta menganalisis perbedaan kebijakan dalam penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan.

1.4 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan di ilmu poltik.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan penanggulangan permasalahan banjir yang terjadi di wilayah DKI Jakarta.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Salah satu pegangan peneliti dalam melakukan penelitian ini ialah, dengan melakukan review terhadap penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan, dimana peneliti mempelajari teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu sehingga peneliti mendapatkan refrensi mengenai topic penelitian saat ini. Akan tetapi dalam penelitian terdahulu, peneliti tidak menemukan persamaan dalam judul penelitian, namun penelitian ini mengambil topic suatu penelitian untuk dijadikan sebagai refrensi dalam mengkaji lebih jauh terkait penelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dimana berupa jurnal perihal dengan penelitian yang akan diteliti.

Penelitian terdahulu yang berkaitan ialah milik Gilang Ramadhan (2018) dari Ilmu Administrasi Universitas Tirtayasa, yang dimana melakukan penelitian perihal kebijakan penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarat. Penelitian tersebut berjudul “Implementasi Penanggulangan Banjir Di DKI Jakarta 2013 –

2017”. Penelitian ini menggunakan analisis dari Edwards III (1984: 9-10) yang memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan mempertanyakan faktor – faktor apa yang mendukung maupun menghambat keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam merumuskan prasyarat atau keadaan yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari implementasi suatu kebijakan peneliti menggunakan perspektif Edwards III dan Grindle. Konsep yang digunakan menurut peneliti ialah menggunakan konsep dari Edwards III (Dalam Haedar Akib. 2010: 2) dikarenakan menurut peneliti konsep ini memiliki kelebihan dalam merumuskan pendekatan masalah implementas dengan mempertanyakan apasaja faktor-faktor apa yang dapat mendukung serta menghambat keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang mengedepankan analisis dari peneliti mengenai tulisan-tulisan yang pernah ada sebelumnya mengenai implementasi kebijakan. Selain itu pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti nantinya dapat menggambarkan permasalahan implementasi kebijakan penanggulangan banjir di DKI Jakarta secara lebih jelas. Jurnal ini menyoroti bahwa terdapat empat faktor sumber masalah maupun prakondisi bagi keberhasilan proses implementasi antara lain :

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Sikap birokrasi atau pelaksana
4. Struktur organisasi termasuk tata aliran kerja birokrasi

Dimana dalam hal ini menjelaskan bahwa untuk mensukseskan suatu implementasi kebijakan maka perlu memadukan kolaborasi antara kepemimpinan yang kuat dan para stakeholder. Proses penanggulangan banjir terbagi dalam tiga kurun waktu yaitu, jangka pendek, menengah dan panjang (Handayani, 2013).

Jurnal ini fokus kepada pengimplementasi kebijakan penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta dimana menurut peneliti implementasi kebijakan merupakan wujud nyata dari suatu kebijakan, dikarenakan sebaik apapun suatu kebijakan maka tidak akan dapat dirasakan manfaatnya apabila tidak diimplementasikan ataupun tidak dapat terimplementasi dengan baik sesuai dengan outcome atau yang diharapkan dari kebijakan itu. Selain itu juga menilai bagaimana suatu implementasi kebijakan dapat terlaksana adalah adanya dana yang disalurkan untuk kebutuhan kebijakan yang direncanakan, dalam hal penanggulangan banjir di DKI Jakarta ini dana yang disiapkan bersumber dari APBN maupun APBD dimana implementasi dinilai sebagai suatu inti dari sebuah kebijakan pemerintah dimana sebagus apapun suatu kebijakan di rencanakan tidak akan ada artinya apabila tidak di implementasikan.

Dalam upaya penanggulangan banjir sedikitnya diperlukan tiga peran stakeholder antara lain :

1. Beneficiaries, masyarakat yang mendapat manfaat atau dampak secara langsung maupun tidak langsung.

2. Intermediaries, kelompok masyarakat atau perseorangan yang dapat memberi pertimbangan atau fasilitasi dalam penanggulangan banjir seperti, konsultam, pakar, LSM, dan profesional di bidang SDA.
3. Decision/ Policy Maker, Lembaga/Institusi yang berwenang membuat keputusan dan landasan hukum, seperti lembaga pemerintahan dan dewan sumberdaya air.

Jurnal ini pun semakin memperkuat landasan pada penelitian ini dimana dikatakan bahwasannya pada kasus proses kebijakan penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta perlulah adanya kolaborasi antara para stakeholder dari segi perencanaan maupun pelaksana kebijakan, yang dimana disebutkan juga bahwa sistem birokrasi pemerintahan yang ada di Indonesia turut mempengaruhi proses kebijakan penanggulangan banjir tersebut. Salah satu faktor yang menjadi keberhasilan suatu implementasi kebijakan ialah sikap birokrasi pemerintahan tersebut dimana dalam permasalahan ini dapat disimpulkan bahwasannya kebanyakan aparatur dalam menyikapi kebijakan masih belum memiliki kesadaran dalam mengimplementasikan kebijakan, aparatur masih belum memiliki sikap inisiatif dan lebih bersifat menunggu. Dimana aparatur yaitu SKPD dan Dinas yang terkait masalah banjir dituntut untuk memahami kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta serta memiliki inisiatif untuk dapat memahai dan menerapkan *political will* dari pemimpin daerah sehingga dapat terbentuk sebuah disposisi yang baik antara pemimpin politik dengan aparatur pelaksana dibawahnya. Hal itu dapat dilihat dari kebijakan penanggulangan banjir yang masih sebatas gagasan oleh level eselon pada suatu

instansi, dan biasanya mengalami kebuntuan pada level pelaksanaan di lapangan, dimana hal ini disebabkan belum terdapat disposisi yang baik antara level atas, menengah dan bawah pada implementasi suatu kebijakan.

Pada level politik, gubernur DKI Jakarta memiliki janji-janji politik saat kampanye yang pada saat terpilih dituangkan ke dalam bentuk program kerja. Program-program kerja tersebut merupakan sesuatu yang baru yang setiap periode politik diterima oleh SKPD, ketika gubernur yang memimpin berubah maka program tersebut akan berubah kembali sesuai dengan janji-janji politik gubernur terpilih. Hal ini yang menjadikan butuh penyesuaian kembali dari tiap instansi untuk dapat melahirkan kesadaran dan inisiatif dalam menjalankan kebijakan tersebut sehingga dapat menyukseskan implementasi kebijakan penanggulangan banjir di DKI Jakarta.

Hal tersebut merupakan dampak dari pemilihan langsung kepala daerah yang melahirkan kepala daerah non PNS yang memimpin hanya pada jangka waktu periode tertentu, kepala daerah berganti sedangkan struktur birokrasi relatif tetap akan melahirkan sikap yang beragam dari birokrasi dalam menanggapi kebijakan baru yang lahir dari kepala daerah baru. Maka dari itu berlandaskan pada penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan dimana penelitian terdahulu terfokus hanya pada implementasi kebijakan di tahun 2013 - 2017 dimana itu pada era kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sedangkan, pada penelitian ini akan mengkomparasikan kedua kebijakan penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan yang secara general tampak memiliki cukup banyak perbedaan baik

dari segi perencanaan, implementasi hingga dapat yang dirasakan oleh masyarakat DKI Jakarta.

1.5.2 Kebijakan Publik

1.5.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Sebelum membahas kebijakan publik lebih jauh perlu diketahui sebelumnya secara umum konsep dasar dari kebijakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan memiliki arti yaitu rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Secara teori kebijakan atau dalam bahasa Inggris disebut *policy* merupakan serangkaian tindakan / kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Leo Agustino 2008: 7). Sedangkan menurut James E Anderson kebijakan merupakan suatu tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berguna untuk memecahkan suatu permasalahan tertentu (Dalam Islamy 2009).

Secara singkat dapat disimpulkan bahwasannya kebijakan merupakan suatu tindakan ataupun kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah yang mana di dalamnya terdapat suatu

unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternative yang berguna untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Masuk kepada konsep kebijakan publik yang dimana studi kebijakan publik itu sendiri memiliki cakupan yang cukup luas dimulai dari sektor politik, sosial, budaya, hukum, ekonomi, dll. Selain itu secara hirarkis kebijakan publik sendiri dapat bersifat nasional ataupun regional (lokal) contohnya seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah / provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten / kota serta keputusan bupati / walikota. Pressman dan Widavsky mendefinisikan Kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan (Dalam Budi Winarno 2002: 17). Selain itu menurut Chandler dan Plano kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan permasalahan publik ataupun pemerintah. Selanjutnya masih menurut Chandler dan Plano kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup serta dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas (Dalam Tangkilisan 2003). Dimana menurut Thomas R Dye memberikan penjelasan mengenai kebijakan publik yang dimana menekankan bahwa kebijakan publik merupakan perwujudan “tindakan” bukan sebuah pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik, dimana dalam hal ini pemerintah juga memiliki pilihan untuk tidak melakukan sesuatu hal itu

juga termasuk dalam kebijakan publik karena memiliki pengaruh yang sama dengan pilihan pemerintah yang melakukan sesuatu.

Maka dari itu dari teori-teori diatas pengertian kebijakan publik itu sendiri merupakan sebuah serangkaian tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh negara (pemerintah) yang memiliki orientasi pada tujuan tertentu untuk guna memecahkan permasalahan-permasalahan publik ataupun demi kepentingan publik itu sendiri.

1.5.2.2 Tahapan Kebijakan Publik

Suatu kebijakan publik yang dibentuk ataupun dihasilkan oleh pemerintah tentu melewati sebuah proses yang cukup kompleks dimana hal ini disebabkan dikarenakan dalam proses suatu kebijakan publik diperlukan banyak variable yang harus dikaji terlebih dahulu. Dalam hal ini adapun tahapan dalam kebijakan publik menurut William Dunn (Budi Winarno 2007) sebagai berikut :

a) Agenda Setting

Pada tahapan ini pemerintah mulai menempatkan masalah yang ada dalam agenda publik, dimana sebelumnya permasalahan-permasalahan yang ada diseleksi dan diurutkan secara prioritas nya yang sekiranya dapat di masukkan dalam agenda kebijakan. Dalam tahapan ini pemerintah dapat melihat mana permasalahan yang akan diselesaikan terlebih dahulu (sesegera mungkin) dan mana permasalahan yang dapat ditunda dikarenakan alasan-alasan tertentu.

a) Formulasi Kebijakan

Setelah permasalahan sebelumnya sudah diseleksi mana yang menjadi prioritas, permasalahan yang sebelumnya telah masuk ke dalam agenda kebijakan dilanjutkan untuk dibahas oleh para pembuat kebijakan. Dalam proses ini pemecahan masalah dilakukan dengan cara memilih berbagai alternative kebijakan yang ada (*policy alternatives/policy options*) dimana para aktor pembuat kebijakan menentukan mana alternative kebijakan terbaik untuk dapat memecahkan permasalahan publik yang ada.

b) Adopsi Kebijakan

Para aktor pembuat kebijakan yang sebelumnya menawarkan berbagai alternative kebijakan memutuskan untuk memilih salah satu alternative terbaik kebijakan yang dipilih melalui dukungan suara mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga ataupun dari putusan peradilan.

c) Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang sebelumnya sudah dirumuskan dan dipilih dilaksanakan atau diwujudkan oleh lembaga-lembaga ataupun badan-badan administrasi terkait kebijakan yang telah ditentukan. Pengimplementasian kebijakan juga sekaligus melihat apakah kebijakan yang telah ditentukan dapat memberikan dampak kepada permasalahan yang ada.

d) Evaluasi Kebijakan

Tahapan terakhir dalam pembuatan kebijakan publik ialah evaluasi yang dimana hal ini diperlukan untuk menilai apakah kebijakan yang diimplementasikan sudah cukup memberi dampak ataupun sudah cukup untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Apabila dalam pengimplementasian kebijakan masih ditemukan kekurangan atau masih belum memberikan dampak yang diinginkan maka perlu adanya pemngkajian ulang kebijakan yang sudah diterapkan agar hasil yang diinginkan dapat maksimal.

1.5.2.3 Faktor Keberhasilan Kebijakan Publik

Dalam pelaksanaan pengimplementasian suatu kebijakan publik, terdapat faktor-faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pengimplementasian kebijakan. Keberhasilan suatu kebijakan publik tidak lepas dari faktor-faktor yang saling berkaitan. Diantara nya menurut Edward III (Subarsono 2011) syarat-syarat keberhasilan suatu kebijakan publik antara lain :

a) Komunikasi

Dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang diinginkan, maka perlu lah seorang pelaksana kebijakan untuk mengerti secara komprehensif terkait kebijakan yang akan dilaksanakan. Selain itu yang nanti nya sebagai objek pengimplementasian kebijakan haruslah diberikan pencerdasan terkait kebijakan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu sosialisai wajib untuk dilaksanakan sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan pengimplementasian kebijakan.

Dalam hal ini pencerdasan dapat dilakukan lewat berbagai cara yaitu media massa, cetak , elektronik, dll.

b) Sumber Daya

Selain komunikasi maupun informasi yang dapat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kebijakan publik, faktor lainnya ialah mengenai sumber daya yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Dimana sumber daya pendukung dapat berupa kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia pelaksana kebijakan serta sumber daya secara finansial. Tanpa ada sumber daya maka bukan tidak mungkin kebijakan yang diinginkan tidak dapat berjalan secara maksimal sesuai yang sudah direncanakan.

c) Disposisi

Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan itu sendiri, dimana jika para pelaksana kebijakan ingin bergerak secara efektif maka para pelaksana harus memiliki kemampuan lebih dari hanya sekedar mengetahui apa yang akan dilakukan akan tetapi kemampuan untuk melaksanakan sehingga nanti dalam praktik pelaksanaannya tidak lagi terjadi bias.

d) Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah struktur yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengimplimentasian kebijakan, dikarenakan birokrasi memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mewujudkan keberhasilan kebijakan.

1.5.3 Bencana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bencana adalah suatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, penderitaan, kecelakaan maupun bahaya. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana dijabarkan lebih lanjut apa yang dimaksud oleh bencana itu sendiri yaitu sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/ atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Lebih lanjut menurut Badan Penanggulangan Bencana Indonesia yang di tuangkan dalam Indeks Risiko Bencana Indonesia atau IRBI mengkategorikan bencana ke dalam tiga kategori antara lain :

- a) Bencana Alam : Bencana yang terjadi akibat dari serangkaian peristiwa alam seperti kekeringan, gunung meletus, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami maupun gempa bumi.
- b) Bencana Non Alam : Bencana yang terjadi akibat dari serangkaian peristiwa non alam seperti kegagalan teknologi, gagal modernisasi, wabah penyakit maupun epidemic.

- c) Bencana Sosial : Bencana yang terjadi akibat dari serangkaian peristiwa ulah/interaksi manusia dalam beraktifitas yang meliputi terror dan konflik sosial antar kelompok ataupun antar komunitas.

Dalam arahan kebijakan Mitigasi Bencana Perkotaan di Indonesia milik Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi atau BAKORNAS BP mengatakan bahwasannya tingkat kerentanan adalah suatu hal penting untuk diketahui sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya bencana, dikarenakan bencana baru saja akan terjadi apabila “bahaya” terjadi pada “kondisi rentan”. Selain itu BAKORNAS PB juga mengartikan ancaman atau bahaya sebagai suatu kejadian ataupun peristiwa yang berpotensi menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, kerusakan lingkungan dan juga menimbulkan dampak suatu kondisi yang ditentukan oleh psikologis. Hubungan ancaman “bahaya” dan kerentanan antara lain : $\text{Ancaman} + \text{Kerentanan} = \text{Bencana}$.

1.5.4 Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana di Indonesia sendiri telah memiliki regulasi nya sendiri dimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga

Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Lebih lanjut dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Berdasarkan regulasi yang ada Indonesia memiliki lembaga khusus dalam upaya penanggulangan bencana yaitu BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) lembaga ini bertanggung jawab untuk melakukan upaya penanggulangan bencana yang terjadi dalam tingkatan nasional, akan tetapi dalam tingkatan kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Adapun tugas dari lembaga ini pun sudah tertuang jelas dalam UU No 24 Tahun 2007 Pasal 12 Tentang Penanggulangan Bencana, UU No 24 Tahun 2007 Pasal 13 Tentang Penanggulangan Bencana, dan UU No 24 Tahun 2007 Pasal 21 Tentang Penanggulangan Bencana.

Secara prinsip dalam melakukan upaya penanggulangan bencana adalah bagaimana untuk mengatasi keterbatasan manusia dalam memprediksi serta menghadapi bencana yang dimana selanjutnya dituangkan kedalam strategi dan kebijakan untuk mengantisipasi, mencegah serta menangani bencana itu sendiri.

1.5.5 Banjir

Banjir merupakan limpasan air yang melebihi tinggi muka air normal, sehingga meilmpas dari palung sungai yang menyebabkan adanya genangan pada

lahan rendah di sisi sungai. Secara umum banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta di atas normal sehingga sistem pengaliran air yang terjadi dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem drainase yang dangkal pada penampungan banjir buatan tidak mampu menampung akumulasi air hujan tersebut sehingga terjadi peluapan (IRBI, 2013 :6). Selain itu pengertian lainnya terkait banjir yaitu merupakan aliran ataupun genangan air yang dapat menimbulkan perekonomian hingga menyebabkan kehilangan nyawa (Asdak, 2007). Dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai banjir dijabarkan bahwasannya merupakan peristiwa dimana meluapnya air sungai yang melebihi palung sungai.

Sungai dan banjir selalu memiliki kaitan yang cukup erat terkhusus pada wilayah DKI Jakarta yang dimana salah satu sungai terbesarnya sungai ciliwung menjadi pusat pengaliran air di wilayah ibukota. Banjir dapat terjadi selain dikarenakan curah hujan yang cukup tinggi mengguyur suatu daerah juga dikarenakan apabila sungai tidak dapat menampung maupun menyalurkan air sampai ke lembah aliran sungai maka akan terjadi tinggi nya debit air sungai tersebut. Tersumbat nya aliran sungai yang dimana menyebabkan tidak tersalurkannya air sungai dengan baik disebabkan oleh menyempitnya bagian badan sungai yang diakibatkan oleh warga yang bermukim disekitaran kawasan bantaran sungai. Selain itu masih kurang nya kesadaran dari masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai juga turut menyebabkan tersumbatnya aliran sungai akibat sampah yang menumpuk.

Banjir itu sendiri memiliki kategori atau jenis yang terbagi berdasarkan lokasi sumber aliran permukaan dan berdasarkan dari mekanisme penyebab

terjadinya banjir (M.Syahril 2010). Adapun berdasarkan dari lokasi sumber aliran permukannya antara lain :

a) Banjir Kiriman (Banjir Bandang)

Penyebab dari banjir ini ialah dimana debit air sungai mengalami peningkatan serta diperparah dengan kiriman air yang berasal dari hulu sungai. Sebagian besar hal ini disebabkan akibat semakin bertambah luasnya daerah yang dibangun yang mengubah koefisien aliran di daerah resapan yang menyebabkan semakin banyaknya air yang menjadi aliran permukaan dan semakin sedikit air yang meresap menjadi air tanah.

b) Banjir Lokal

Penyebab dari banjir ini ialah dimana tingginya intensitas curah hujan ditambah belum tersedianya drainase yang memadai, drainase yang tersedia lebih bersifat sementara (setempat) yang disesuaikan dengan luas sebaran hujan lokal atau dapat didefinisikan yaitu banjir yang terjadi akibat volume hujan pada daerah tersebut melebihi kapasitas pembuangan disuatu wilayah.

c) Banjir Rob

Penyebab dari banjir ini ialah tingginya pasang surut air laut yang melanda daerah pemukiman yang berada di pinggiran laut atau pantai.

Sedangkan berdasarkan mekanisme banjir itu sendiri terdapat dua jenis, antara lain :

- a) Regular Flood : banjir yang disebabkan oleh hujan
- b) Irregular Flood : banjir yang disebabkan selain dari hujan seperti gelombang pasang, hancurnya bendungan hingga tsunami

Penyebab banjir secara general dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori antara lain banjir yang disebabkan oleh sebab-sebab alami dan yang disebabkan oleh tindakan manusia (Kodotie dan Sugianto 2002).

1.6 Definisi Konsep

Definisi konsep dari penelitian Studi Komparasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Wilayah DKI Jakarta Pada Era Kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan ialah komparasi kebijakan publik dalam penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta. Dimana pada penelitian ini fokus dengan bagaimana proses kebijakan yang telah dilakukan dan diimplementasikan untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang melanda DKI Jakarta dalam hal ini sudah cukup menimbulkan kerugian secara materil maupun korban jiwa. Selain itu menganalisis upaya mitigasi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam penanggulangan banjir serta penyebab banjir yang terjadi di masing-masing era kepemimpinan yang dimana penyebab ini menjadi salah satu faktor dalam pengambilan keputusan pembuatan kebijakan penanggulangan banjir di DKI Jakarta.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Berdasarkan penjabaran dari definisi konsep penelitian yang mengacu pada teori yang dipergunakan, maka daripada itu operasionalisasi konsep penelitian ini ialah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Operasionalisasi Konsep

Variabel	Dimensi	Indikator
Kebijakan Publik	Faktor Keberhasilan Kebijakan	Komunikasi antara pelaksanan kebijakan dan objek pengimplementasian kebijakan
		Sumber daya pendukung dalam pengimplementasian
		Kapabilitas dan kompetensi pelaksana kebijakan penanggulangan banjir
		Struktur birokrasi dalam pengimplementasian kebijakan
	Evaluasi Kebijakan	Target yang tidak di capai
		Faktor penghambat pengimplementasian
Bencana	Penanggulangan Bencana	Regulasi yang mengatur
		Upaya pencegahan (mitigasi)
	Dampak Bencana	Korban jiwa
		Kerugian materil atau finansial
Banjir	Faktor Alam	Intensitas curah hujan
		Iklim

	Faktor Non Alam	Penduduk di bantaran sungai
		Sistem drainase

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian ialah sebuah cara ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan tujuan maupun kegunaan tertentu. Cara ilmiah disini berarti sebuah kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan antara lain rasionalitas, empiris, dan sistematis. Dimana rasionalitas yaitu kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal (logis), dengan demikian dapat dijangkau dengan nalar dan pikiran manusia. Selain itu empiris memiliki makna yaitu dimana cara-cara yang dilakukannya itu dapat diamati dan dirasakan oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. Terakhir sistematis yang berarti proses penelitian yang dilakukan menggunakan langkah-langkah yang memang dipilih dan bersifat logis.

Terdapat berbagai jenis maupun opsi dari metode penelitian yang dapat dipilih dengan menyesuaikan penelitian yang dilakukan antara lain pertama, observasi dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk dapat mengamati perilaku maupun aktivitas individu ataupun kelompok di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti dapat mencatat setiap aktivitas yang terjadi pada lokasi penelitian. Kedua, metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan

melakukan *face-to-face interview* (wawancara tatap muka langsung) dengan narasumber terpercaya atau partisipan. Dalam wawancara ini dibutuhkan pertanyaan tidak terstruktur akan tetapi bersifat terbuka yang dimana dirancang untuk memunculkan pandangan maupun opini dari para narasumber ataupun partisipan. Ketiga, yaitu dengan mengumpulkan dokumen yang berupa dokumen publik yang antara lainnya ialah majalah, koran, laporan ataupun dokumen privat yang berupa buku harian, diari surat hingga email.

Salah satu jenis penelitian secara kualitatif deskriptif ialah berupa penelitian dengan metode ataupun pendekatan studi komparasi yang dimana merupakan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua objek atau lebih. Penelitian komparasi juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda serta menemukan hubungan sebab-akibatnya.

Metode komparasi merupakan suatu metode yang digunakan guna membandingkan data-data yang ditarik dalam konklusi baru. Dalam bahasa inggris komparasi sendiri memiliki arti yaitu *compare* yang secara sederhana merupakan kegiatan membandingkan untuk menemukan persamaan ataupun perbedaan dari dua konsep atau lebih. Dengan metode komparasi peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi baru dengan cara membandingkan pemikiran, pendapat, ide hingga konsep guna mengetahui perbedaan yang terjadi dalam kebijakan penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama dan Anies Baswedan.

Penelitian komparasi merupakan sejenis penelitian deskriptif yang dimana bertujuan untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadi hingga munculnya suatu fenomena tertentu (Nazir 2005:58). Studi komparasi merupakan suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan ataupun persamaan dalam suatu konsep maupun kebijakan.

Sebuah penelitian sudah barang tentu memiliki tujuan serta kegunaan tertentu. Secara umum tujuan dari penelitian terdapat tiga macam antara lain bersifat penemuan, pembuktian serta pengembangan. Penemuan yang dimaksud ialah berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Selanjutnya pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan kebenaran informasi ataupun pengetahuan tertentu serta terakhir pengembangan yang memiliki arti memperdalam serta memperluas pengetahuan yang ada.

1.8.1 Design Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang tepat untuk mengeksplorasi serta memahami makna yang berasal dari permasalahan sosial. Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan peneliti ingin mengeksplorasi lebih jauh serta memahami bagaimana kebijakan dalam

penanggulangan banjir di wilayah DKI Jakarta pada era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama maupun Anies Baswedan.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi dimana data-data yang dibutuhkan oleh peneliti dapatkan baik itu data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini penelitian dilakukan di Provinsi DKI Jakarta yang dimana sebagai pengimplementasian kebijakan penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama maupun Anies Baswedan.

1.8.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan individu, kelompok ataupun instansi yang mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis *purposive sampling*. Dimana *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu, dalam hal ini menilai bahwa individu, kelompok atau instansi tersebut dianggap memiliki kredibilitas atau mumpuni dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Selain *purposive sampling* peneliti juga menggunakan *snowball sampling* dimana pada penelitian ini nanti nya responden dan informan yang sebelumnya sudah dipilih diminta untuk memberikan rekomendasi responden selanjutnya yang memiliki kredibilitas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Adapun responden dan informan yang dipilih dalam penelitian ini ialah :

1. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Periode Tahun 2015-2019
2. Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Air Tahun 2021
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
4. Kepala Bagian Pekerjaan Umum Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
5. Kepala Seksi Publikasi dan Pembinaan Masyarakat di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021
6. Kepala Seksi Pemeliharaan Suku Dinas SDA Jakarta Pusat Tahun 2021

1.8.4 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan berupa data kualitatif dalam bentuk :

1. Sumber Tertulis

Data ini berasal dari berita dalam surat kabar, dokumen dari informan dan instansi atau institutis yang mendukung pemenuhan data untuk penelitian.

2. Wawancara

Hal ini merupakan suatu proses untuk menemukan keterangan sebagai tujuan penelitian dengan memberikan sejumlah pertanyaan sambil bertatap

muka langsung antara peneliti dengan informasi atau tanpa panduan wawancara.

1.8.5 Sumber Data

a) Data Primer

Sumber data primer ialah merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dengan Dinas atau Instansi terkait yang menangani langsung perihal banjir di wilayah DKI Jakarta.

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari serta memahami penelitian melalui media lain yang bersumber pada literature, buku ataupun dokumen pendukung. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung informasi data primer. Dalam hal ini data sekunder merupakan data yang bersumber pada literature yang memiliki kaitan dengan kebijakan penanggulangan banjir wilayah DKI Jakarta.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

a) Observasi

Obervasi merupakan sebuah aktivitas dalam suatu proses penelitian, dimana peneliti akan melakukan pengamatan secara komprehensif terhadap objek penelitian yang telah ditentukan dalam hal ini mengamati secara langsung di

lokasi penelitian yaitu DKI Jakarta untuk mengamati sejauh apa pengimplementasian kebijakan penanggulangan banjir yang telah dilakukan baik pada era Basuki Tjahaja Purnama maupun Anies Baswedan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara riil kondisi yang ada di lapangan serta membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang dilakukan.

b) Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Pada wawancara mendalam (*in-depth interview*) merupakan proses memperoleh keterangan dengan tujuan untuk penelitian menggunakan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman atau panduan wawancara. Pihak yang diwawancarai ialah Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta dan Kepala BPBD DKI Jakarta pada era Basuki Tjahaja Purnama maupun Anies Baswedan.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, kutipan, artikel dan referensi lain. Dokumen yang digunakan merupakan artikel yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan banjir wilayah DKI Jakarta.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Proses analisis data pada penelitian kualitatif keseluruhan dengan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar, sedangkan dalam tahap analisis data kualitatif terdapat beberapa cara yang bisa digunakan. Antara lain pertama, raw data yang merupakan data yang didapatkan selama penelitian. Raw data berisikan fakta informasi. Dalam penelitian ini raw data merupakan hasil dari wawancara yang dilakukan dengan subyek penelitian dan catatan di lapangan pada saat penelitian berlangsung. Selanjutnya, mengolah serta mempersiapkan data untuk dianalisis. Pada tahap ini berisi persiapan data dengan cara mengolah data mentah dan mensortir serta menyusun kedalam jenis yang berbeda yang tergantung pada sumber informasi. Terakhir, membaca secara keseluruhan data dimana dalam tahap ini meliputi membaca semua data yang ada untuk memperoleh makna tersebut secara umum yang dapat merefleksikan makna secara keseluruhan.

1.8.8 Kualitas Data

Demi menguji dan mengetahui keabsahan data yang telah diperoleh, peneliti akan menggunakan metode triangulasi. Dimana metode ini digunakan untuk memeriksa data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu triangulasi juga digunakan sebagai pembanduing terhadap data yang sebelumnya telah diperoleh. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teori, sumber data dan metode.

Triangulasi teori dipergunakan dimana hasil akhir penelitian kualitatif yang berupa sebuah rumusan informasi ataupun thesis statement, informasi yang telah didapatkan tersebut dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan yang sebelumnya sudah dijabarkan oleh peneliti terkait teori apa saja yang dipergunakan dalam penelitian, hal ini digunakan demi menghindari bias individual peneliti atas temuan ataupun kesimpulan yang dihasilkan. Triangulasi teori juga dapat meningkatkan kedalaman pemahaman dimana peneliti dapat menggali pengetahuan teoritik secara mendalam terhadap hasil analisis data yang telah dihasilkan.

Triangulasi sumber data dipergunakan untuk menguji kredibilitas data yang ada dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal penelitian ini sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, diaman dari kedua sumber data tersebut menghasilkan data yang tidak bisa dirata-ratakan. Oleh sebab itu triangulasi sumber dilakukan untuk mendeskripsikan, mngekategorikan persamaan serta perbedaan, dan spesifikasi data yang diperoleh dari kedua sumber data tersebut.

Triangulasi metode dipergunakan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Dimana dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survei yang dimana untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat serta gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu. Hal ini juga dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Selain itu peneliti juga dapat menggunakan informan yang berbeda untuk memasttikan atau mengecek kebenaran informasi yang telah diperoleh

sebelumnya. Triangulasi pada tahap ini dilakukan apabila terdapat data ataupun informasi yang sebelumnya telah diperoleh dari subjek atau informan penelitian akan tetapi diragukan kebenarannya.